



Penandatanganan Nota Kesepahaman Kekayaan Intelektual Komunal

Dari Angguk Sampai Sekaten Raih Penghargaan

Menjeri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi pada kekayaan intelektual baik personal maupun komunal. Hal ini agar tidak ada lagi negara lain yang melakukan klaim terkait kekayaan budaya dan intelektual.

Ini adalah sosialisasi karena Indonesia kaya dengan budaya dan tari maupun pengetahuan perlu dilindungi, tidak hanya paten dan merk. Pemerintah Yogya responsif, dan kami berusaha melindungi itu," katanya usai menyerahkan penghargaan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Keraton Yogyakarta.

Puro Pakualaman serta Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY di Bangsal Keparipahan, Rabu (17/7).

Adapun penyerahan penghargaan tersebut dilakukan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang ditandatangani langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Yasonna Hamonangan Laoly serta disaksikan oleh Dirjen HAM, Pimpinan Tinggi Madya, Kakanwil Hukum HAM DIY dan Jateng, Forkoptimda DIY, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga turut membuka upaya sosialisasi KIK. Yasonna menuturkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud dan komitmen yang kuat dari Penda DIY untuk ikut serta dalam memajukan dan memperkuat sistem kekayaan intelektual nasional. Apresiasi yang tinggi diberikan atas komitmen Pem-

da DIY yang konsisten menjaga dan mengembangkan kekayaan intelektual khususnya yang berada di wilayah DIY.

Di sisi lain, Yasonna menambahkan bahwa sistem kekayaan intelektual tak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum namun juga tidak bisa dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.

Dalam forum perdagangan internasional, pembaharuan mengenai sistem kekayaan intelektual menjadi hal sentral. Untuk itu, tentunya diperlukan

● ke halaman 15



MOU - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly dan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menandatangani Nota Kesepahaman Kekayaan Intelektual Komunal, Rabu (17/7).

TRIBUN JOGJA/HASAN SARRI GOZHALI

Dari Angguk

● Sambungan Hal 9

komitmen dan perhatian khusus untuk memajukan dan menjaga sistem kekayaan intelektual seperti halnya yang dilakukan oleh Penda DIY.

- "Dulu pernah ada negara klaim tari mereka, seperti Reog Ponorogo, ada batik, inovasi didaftarkan dapat perlindungan. Kami juga mendorong agar hak paten, merk, desain grafis dan dunia industri, kuliner bisa tetap memiliki keunikan dan tidak bisa diklaim negara lain," jelasnya.

Adapun pemberian penghargaan dilakukan secara berurutan dengan rincian sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman atas komitmen menjaga kelangsungan Upacara Adat Bekalak, Pemerintah Kabupaten Bantul atas komitmen menjaga kelangsungan Tari Montro, Pemerintah Kota Yogyakarta atas komitmen menjaga tradisi Mubeng Beteng, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas komitmen menjaga kesenian Tayub Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas komitmen menjaga kesenian Tari Angguk, Kraton Yogyakarta atas komitmen melestarikan Upacara Sekaten, dan Puro Pakualaman atas komitmen melestarikan Beksan Bondroboyo.

Menurut Yasonna, DIY dinilai tetap layak untuk mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2019 ini setelah mendapatkan penghargaan serupa tahun 2013 lalu.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menjelaskan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) personal dan komunal sesungguhnya banyak dimiliki masyarakat Yogya. Banyak anak muda bergerak di industri kreatif, demikian juga akar komunal yang bercah di kearifan lokal dan seni

tradisi.

Sultan menyebut betapa pentingnya penandatanganan dokumen ini karena hasil inovasi dan kreasi anak negeri akan lebih terlindungi dari pembajakan dan pemalsuan. Dia juga berharap dalam pelaksanaannya akan dapat dilakukan perencanaan secara cermat dan melakukan sosialisasi secara luas.

"Dengan adanya dukungan dokumentasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal untuk keperluan dan pengembangan lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi," ujar Sultan. (als)

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 008

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005